

Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan Administratif Guna Perbaikan Grade Koperasi Wanita di Wilayah Kecamatan Diwek

Langgeng Prayitno Utomo, Rita Mutiarni, Ratna Dwi Jayanti
STIE PGRI Dewantara Jombang
Korespondensi: rita.dewantara@gmail.com

Diserahkan: 5 Januari 2020, Direvisi: 2 Pebruari 2020, Diterima: 15 Maret 2020

Abstrak

Tujuan kegiatan ini adalah pemetaan serta identifikasi kebutuhan administratif guna perbaikan grade koperasi wanita (kopwan) di wilayah kecamatan Diwek. Kegiatan ini melibatkan 20 mitra yaitu 20 koperasi wanita yang tersebar di seluruh desa di wilayah kecamatan Diwek. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan tahapan: 1) penelusuran grade masing-masing kopwan, 2) konfirmasi kepada pengurus kopwan tentang grade koperasi yang didapat dari <https://depkop.go.id>, 3) Identifikasi kebutuhan dokumen guna perbaikan grade. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa mayoritas kopwan berada pada grade D. Untuk itu, diperlukan beberapa usaha dari pihak kopwan dan Dinas Koperasi dan UMK Jombang untuk memperbaiki grade kopwan.

Kata Kunci: Grade, Koperasi Wanita, Kecamatan Diwek

Abstract

The purpose of this activity is to map and identify administrative needs in order to improve the grade of women's cooperatives (Kopwan) in the Diwek district. This activity involved 20 partners, namely 20 women's cooperatives spread across villages in the Diwek sub-district area. This activity was carried out online with the following stages: 1) tracking the grade of each kopwan, 2) confirmation to the Kopwan management regarding the grade of the cooperative obtained from <https://depkop.go.id>, 3) Identifying the need for documents to improve grade. From the results of the search, it was found that the majority of the Kopwan were in grade D. For this reason, it took several efforts from Kopwan and Jombang Cooperative & Small Mikro service to improve the Kopwan grade.

Keywords: Grade, Women's Cooperative, Diwek District

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Penjelasan dari pasal 33 tersebut adalah bahwa kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan bukan kepentingan orang-perorang. Pasal 33 ini menempatkan koperasi sebagai *soko guru* dalam perekonomian nasional, dan perannya dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi rakyat. Dalam pelaksanaannya, koperasi diharapkan tumbuh sebagai organisasi dan badan usaha yang dapat berperan sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 serta diharapkan juga mampu berhasil memajukan unit usaha di dalamnya baik secara mutu maupun kuantitas, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan tengah menyiapkan sejumlah langkah agar koperasi bisa sejajar dengan korporasi atau usaha besar, namun peran koperasi belum mampu berkontribusi secara maksimal. Jumlah usaha besar yang ada di Indoensia hanya 0,01% namun menguasai 40 persen pembangunan, sementara 99,9% UMKM hanya menguasai 60% (Rosihan, 2019). Kondisi ini perlu diperbaiki agar struktur ekonomi Indonesia lebih berkeadilan apalagi dengan pengalaman krisis

multidimensi beberapa kali yang ada selama ini terbukti bahwa koperasi dan UKM-lah yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia (Aini, 2017).

Guna meningkatkan performa koperasi, kabupaten Jombang telah melakukan pembinaan tentang perkoperasian melalui Dinas Koperasi dan UMK Jombang. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa ada 846 koperasi di kabupaten Jombang yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) dan Koperasi wanita (Kopwan).

Dari 846 koperasi tersebut tidak semua dalam kondisi baik. Mayoritas koperasi di Jombang berada pada grade “C” (<http://www.depkop.go.id/>, 2019). Penilaian *grade* pada koperasi di Indonesia adalah berdasarkan keteraturan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Salah satu penyebab ketidakteraturan penyelenggaraan RAT adalah ketidakmampuan/keterbatasan pengurus koperasi guna membuat laporan seperti yang distandarkan Dinas koperasi dan UMK (Widiana, R, 2016)

Koperasi wanita (Kopwan) di wilayah kabupaten Jombang memiliki sebaran yang merata. Dari 306 desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Jombang, semuanya memiliki kopwan. Namun demikian, kondisi tingkat/ grade kopwan di kabupaten Jombang, mayoritas berada pada grade “D” (<http://www.depkop.go.id/>, 2019). Hal ini tentu sangat disayangkan, karena bagi suatu organisasi, khususnya organisasi nirlaba seperti kopwan, salah satu hal yang menjadi motivasi dalam bekerja, bukan pada besarnya reward berupa gaji/honor yang diberikan tapi juga penghargaan dari pemerintah berupa predikat sebagai koperasi yang baik dan sehat (Pratiwi, 2016)

STIE PGRI Dewantara sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jombang terpenggil untuk ikut melakukan kegiatan yang bermakna bagi masyarakat salah satunya melalui pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan pendampingan kepada koperasi juga telah dilakukan oleh STIE PGRI Dewantara Jombang, mengingat koperasi adalah salah satu pilar ekonomi khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan sektor mikro (Mutiarini, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. 2017) Dari hasil observasi awal team pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), mayoritas para pengurus koperasi tidak paham grade pada kopwannya serta apa yang harus dilakukan guna memperbaiki keadaan tersebut. Dinas koperasi dan UMK Jombang juga belum memberikan pembinaan serta sosialisasi untuk masalah ini, karena selama ini Dinas koperasi dan UMK lebih banyak memberikan pembinaan untuk hal-hal yang lebih besar yaitu pelatihan dan pendampingan kegiatan manajemen dan operasional kopwan agar bisa terus menjalankan kegiatannya.

Berangkat dari fenomena tersebut, team pelaksana PKM menitikberatkan kegiatan kali ini yaitu pada upaya perbaikan grade koperasi dari segi administrative, yang dimulai dari pemetaan grade koperasi hingga identifikasi kebutuhan guna perbaikan grade tersebut. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada semester berikutnya yaitu pelaksanaan pendampingan pemenuhan dokumen hingga pengunggahan secara daring dokumen yang dibutuhkan pada situs <http://www.depkop.go.id/>

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam satu semester dilaksanakan dalam bentuk koordinasi secara daring yang dilakukan melalui whatsapp (WA) maupun telpon langsung kepada para Ketua kopwan di wilayah kecamatan Diwek. Koperasi Wanita yang ada di wilayah kecamatan Diwek dan terdaftar di Dinas Koperasi dan UMK Jombang sebanyak 20 organisasi. Hal ini berarti bahwa keberadaan kopwan ada di tiap desa di kecamatan Diwek. Dari 20 kopwan tersebut, dikoordinator seorang coordinator

kopwan, guna memudahkan koordinasi diantara kopwan ang ada di kecamatan Diwek tersebut.

Kegiatan Utama koperasi tersebut seluruhnya adalah simpan pinjam dengan trend perkembangan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, secara administratif dan pelaporan kurang rapid an konsisten, sehingga grade / tingkatan kopwan yang ada di kecamatan Diwek mayoritas masih buruk yaitu berada di grade paling bawah (Chandrasita, 2018). Guna membantu peningkatan grade tersebut, maka team pelaksana PKM melakukan pemetaan administratif terlebih dahulu dengan cara melakukan wawancara dengan pengurus koperasi di wilayah kecamatan Diwek.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN

Kegiatan pendampingan ini diawali dengan pemetaan koperasi wanita yang ada di kecamatan Diwek, sesuai daftar resmi yang ada di Dinas Koperasi dan UMK Jombang. Berikut adalah daftar koperasi wanita yang berada di kecamatan Diwek.

Tabel 1: Daftar Koperasi Wanita (Kopwan) di Wilayah Kecamatan Diwek

No	Nama Koperasi Wanita	Desa
1	Anggrek Bulan	Cukir
2	Pandan Arum	Pandanwangi
3	Sejahtera	Puton
4	Karya Ibu	Kedawong
5	Wanita Karya	Balongsbesuk
6	Jati Mandiri	Jatirejo
7	Amanah	Jatipelem
8	Sejahtera	Diwek
9	Setia Bhakti	Kwaron
10	Bunga Harapan	Ceweng
11	Karya Wanita	Bandung
12	Ngudi Makmur	Ngudirejo
13	Mawar	Watugaluh
14	Sumber Makmur	Grogol
15	Mandiri	Keras
16	Burinja	Bulurejo
17	Kayangan Jaya	Kayangan
18	Sakinah	Bendet
19	Sumber Makmur	Brambang
20	Mulya Indah	Pundong

Dari 20 kopwan tersebut, mayoritas para pengurus koperasi tidak tahu peringkat pada masing-masing koperasinya, serta bagaimanakan cara meningkatkan grade koperasinya karena selama ini, Dinas Koperasi dan UMK Jombang belum memberikan sosialisasi tentang hal tersebut.

Selanjutnya, team pelaksana PKM mulai melakukan pemetaan kelengkapan administratif pada masing – masing kopwan. Langkah – langkah yang dilakukan oleh team pelaksana PKM adalah:

1. Melakukan koordinasi awal dengan para ketua kopwan di wilayah kecamatan Diwek tentang kondisi masing-masing kopwan.
2. Memetakan grade masing-masing kopwan. Informasi grade masing-masing kopwan diperoleh team pendamping pada web: <https://depkop.go.id>

3. Mencocokkan hasil penelusuran tersebut dengan kondisi di lapangan
4. Memetakan kebutuhan administratif yang harus dilengkapi masing-masing kopwan guna peningkatan Grade Koperasi Wanita di Kecamatan Diwek.

Dari rangkaian kegiatan tersebut diatas, team pelaksana PKM telah berhasil memetakan grade pada masing-masing koperasi, masa berlaku Nomor Induk Koperasi serta laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang belum dilaporkan ke Dinas Koperasi dan UMK Jombang. Hal ini akan ditindaklanjuti pada kegiatan PKM selanjutnya, yaitu pendampingan pemenuhan kelengkapan administrative guna perbaikan grade kopwandi semester berikutnya. Hasil dari pemetaan kondisi grade serta kelengkapan administrative lainnya pada masing kopwan di wilayah kecamatan Diwek adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Identifikasi Koperasi Wanita Di Kecamatan Diwek

NO		1
NAMA KOPERASI		ANGGREK BULAN
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/925/BH/XVI.8/415.35/09
	TANGGAL	19/11/2009
Jenis Usaha		Jasa Keuangan dan Asuransi
Grade		D
keterangan		Sudah Bersertifikat
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Cek masa kadaluawarsa NIK

NO		2
NAMA KOPERASI		PANDAN ARUM
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/926/BH/XVI.8/415.35/09
	TANGGAL	19/11/2009
Jenis Usaha		Jasa Keuangan dan Asuransi
Grade		D
keterangan		Belum Bersertifikat
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yg Bl dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang

NO		3
NAMA KOPERASI		SEJAHTERA
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/928/BH/XVI.8/415.35/09
	TANGGAL	19/11/2009
Jenis Usaha		Jasa Keuangan dan Asuransi
Grade		D
keterangan		Belum Bersertifikat
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang

NO	4	
NAMA KOPERASI	KARYA IBU	
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/916/BH/XVI.8/415.35/09
	TANGGAL	19/11/2009
Jenis Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
Grade	D	
keterangan	Belum Bersertifikat	
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yg Bl dilaporkan	th 2019, 2020
	NIK	Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang

NO	5	
NAMA KOPERASI	WANITA KARYA	
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/923/BH/XVI.8/415.35/09
	TANGGAL	19/11/2009
Jenis Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
Grade	C2	
keterangan	Sudah Bersertifikat	
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2019
	NIK	-

NO	6	
NAMA KOPERASI	JATI MANDIRI	
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/918/BH/XVI.8/415.35/09
	TANGGAL	19/11/2009
Jenis Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
Grade	D	
keterangan	Sudah Bersertifikat	
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Cek masa kadaluwarsa NIK

NO	7	
NAMA KOPERASI	AMANAH	
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/914/BH/XVI.8/415.35/09
	TANGGAL	19/11/2009
Jenis Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
Grade	B	
keterangan	Sudah Bersertifikat	
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	-
	NIK	-

NO	8	
NAMA KOPERASI	SEJAHTERA	
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/262/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	22/03/2010
Jenis Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
Grade	D	
keterangan	Sudah bersertifikat	
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Cek masa kadaluawarsa NIK

NO	9	
NAMA KOPERASI	SETIA BHAKTI	
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/225/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	17/03/2010
Jenis Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
Grade	D	
keterangan	Sudah Bersertifikat	
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Cek masa kadaluawarsa NIK

NO	10	
NAMA KOPERASI	BUNGA HARAPAN	
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/222/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	17/03/2010
Jenis Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
Grade	D	
keterangan	Sudah Bersertifikat	
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Cek masa kadaluawarsa NIK

NO	11	
NAMA KOPERASI	KARYA WANITA	
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/198/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	15/03/2010
Jenis Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
Grade	D	
keterangan	Sudah Bersertifikat	
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Cek masa kadaluawarsa NIK

NO		12
NAMA KOPERASI		NGUDI MAKMUR
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/350/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	31/03/2010
Jenis Usaha		Jasa Keuangan dan Asuransi
Grade		D
keterangan		Sudah Bersertifikat
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Cek masa kadaluawarsa NIK

NO		13
NAMA KOPERASI		MAWAR
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/223/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	17/03/2010
Jenis Usaha		Jasa Keuangan dan Asuransi
Grade		D
keterangan		Sudah Bersertifikat
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Cek masa kadaluawarsa NIK

NO		14
NAMA KOPERASI		SUMBER MAKMUR
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/200/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	15/03/2010
Jenis Usaha		Jasa Keuangan dan Asuransi
Grade		D
keterangan		Belum Bersertifikat
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	-
	NIK	Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang

NO		15
NAMA KOPERASI		MANDIRI
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/229/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	17/03/2010
Jenis Usaha		Jasa Keuangan dan Asuransi
Grade		D
keterangan		Belum Bersertifikat
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2019, 2020
	NIK	Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang

NO		16
NAMA KOPERASI		BURINJA
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/199/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	15/03/2010
Jenis Usaha		Jasa Keuangan dan Asuransi
Grade		D
keterangan		Sudah Bersertifikat
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Cek masa kadaluawarsa NIK

NO		17
NAMA KOPERASI		KAYANGAN JAYA
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/224/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	17/03/2010
Jenis Usaha		Jasa Keuangan dan Asuransi
Grade		D
keterangan		Belum Bersertifikat
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2019, 2020
	NIK	Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang

NO		18
NAMA KOPERASI		SAKINAH
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/197/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	12/03/2010
Jenis Usaha		Jasa Keuangan dan Asuransi
Grade		D
keterangan		Belum Bersertifikat
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang

NO		19
NAMA KOPERASI		SUMBER MAKMUR
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/1100/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	30/11/2010
Jenis Usaha		Jasa Keuangan dan Asuransi
Grade		D
keterangan		Sudah Bersertifikat
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2018, 2019, 2020
	NIK	Cek masa kadaluawarsa NIK

NO	20	
NAMA KOPERASI	MULYA INDAH	
BADAN HUKUM	NOMOR	518.1/1101/BH/XVI.8/415.35/10
	TANGGAL	30/11/2010
Jenis Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
Grade	D	
keterangan	Belum Bersertifikat	
Identifikasi Kebutuhan	RAT Yang Belum Dilaporkan	th 2019, 2020
	NIK	Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang

D. PENUTUP

Dari seluruh rangkaian kegiatan PKM yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Secara operasional, kondisi kopwan di wilayah kec. Diwek sudah baik. Hal ini terbukti dari pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang rutin diselenggarakan setiap tahun sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Secara administrative, kondisi kopwan di wilayah kecamatan Diwek masih perlu perbaikan. Hal ini tampak dari hasil penelusuran resmi di <https://depkop.go.id>, bahwa dari 20 kopwan yang ada di wilayah kecamatan Diwek, hanya 1 kopwan yang berada pada grade B, 1 kopwan berada pada grade C2, sedangkan 18 yang lain berada pada grade D.

Beberapa factor penyebab dari hal tersebut diatas antara lain: 1) a. Ketidaktahuan para pengurus kopwan bahwa kopwanya belum bersertifikat, 2) Ketidaktahuan para pengurus kopwan bahwa masa berlaku sertifikat koperasinya telah habis, 3) Belum dilaporkannya hasil RAT tahun – tahun yang lalu ke Dinas Koperasi dan UMK Jombang oleh pengurus yang lama dan 4) Sudah dilaporkannya hasil RAT tahun – tahun yang lalu ke Dinas Koperasi dan UMK Jombang namun belum diunggah secara daring ke situs <https://depkop.go.id>

Dari Simpulan diatas maka disarankan kepada pengurus kopwan di wilayah kecamatan Diwek hendaknya mengecek kembali masa berlaku sertifikat kopwannya. Pengurus kopwan di wilayah kecamatan Diwek hendaknya juga melengkapi berbagai persyaratan administrative guna pengurusan sertifikat atau perpanjangan sertifikat kopwan. Selain itu, pengurus kopwan di wilayah kecamatan Diwek hendaknya menyampaikan kembali laporan RAT tahun-tahun yang lalu kepad Dinas Koperasi dan UMK Jombang agar bisa diunggah ulang, sebagai salah satu syarat perbaikan grade koperasi. Bagi Dinas Koperasi dan UMK Jombang hendaknya aktif memberikan informasi serta melakukan pendampingan guna perbaikan grade kopwan di wilayah kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, n., & agus, f. (2017). Penerapan metode weighted product dan analytic hierarchy process untuk pemilihan koperasi berprestasi. *Jurnal infotel*, 9(2), 220-230.

- Chandrasita, n., sobri, k. M., & nisyak, h. (2018). *Implementasi kebijakan penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (nik) di dinas koperasi, ukm provinsi sumatera selatan* (doctoral dissertation, sriwijaya university).
- Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. (2017). Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng. *Comvice: Journal of community service*, 1(1), 33-38.
- Pratiwi, e. (2016). *Sistem informasi pendataan usaha kecil menengah (ukm) pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi sumatera selatan* (doctoral dissertation, politeknik negeri sriwijaya).
- Rosihan, r., & lutfi, s. (2019). Pendataan koperasi pada dinas koperasi dan ukm kota ternate berbasis web. *Jiko (jurnal informatika dan komputer)*, 1(1), 13-20.
- Widiana gumilar, a. (2016). Laporan hasil kerja praktek pendataan koperasi menggunakan delphi pada dinas koperasi dan usaha kecil menengah (kukm) propi.